

Daftar Pustaka

A. Buku

- Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Surabaya.
- Irina, Fristiana, 2017, *Metodologi Penelitian Terapan*, Parama ilmu, Bantul.
- Moeleong, Lexy J, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Cet. XXII, Remaja Rosdakarya, Jakarta.
- Maria, S.W, Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.
- Maria, S.W, Sumardjono, 2008, *Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas Gramedia, Jakarta.
- Maria, S.W, Sumardjono, 2008, *Mediasi Sengketa Tanah*, Kompas, Jakarta.
- Nurnaningsih Amrani, 2012, *Mediasi Alternatif Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rusmadi Murad, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah*, Mandar Maju, Bandung.
- Soprapto dan Haddy, 2017, *Metodologi Penelitian Untuk Karya Ilmiah*, Gosyen Publishing, Sleman.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1983, *Metode Penelitian Hukum*, Galia Indonesia, Jakarta.
- Supriadi, 2008, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Urip Santoso, 2015, *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta.
- Waskito dan Hadi Amowo, 2017, *Pertanahan Agraria dan Tata Ruang*, Kencana, Jakarta.

B. Internet

Widhihandoko, *Asas Kontrakdiktur Delimitasi*, Diakses dari <http://widhihandoko.com/?tag=asas-kontrakdiktur-delimitasi>, pada tanggal 28 November 2018.

Aprilya Sabratina, *Pengertian Sengketa Tanah*, diakses dari <https://dokumen.tips/documents/pengertian-sengketa-tanah.html>, pada tanggal 20 September 2018

C. Jurnal :

Aryani Witasari, 2011, *Konsekuensi Hukum Bagi Seorang Arbiter Dalam Memutus Suatu Perkara Berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 1999*, Jurnal Hukum Vol XXV No 1

D. Peraturan Perundangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan
Nasional

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2011 Tentang Pengkajian Pengelolaan dan Penanganan
Kasus Pertanahan